



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

APBN 2025 BAGI AKSELERASI PEMBANGUNAN INKLUSIF BERKELANJUTAN

Ariesy Tri Mauleny
Analisis Legislatif Ahli Madya
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF 2025) disusun pada masa transisi. KEM-PPKF 2025 ini menjadi titik tumpu menuju Indonesia Emas 2045, yang akan dijalankan oleh rezim pemerintahan baru. Dalam menghadapi permasalahan *middle income trap* (MIT) dibutuhkan *exit strategy* yang mensyaratkan terobosan kebijakan hingga akselerasi pertumbuhan 6-8% per tahun. Desain kebijakan fiskal 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif, namun tetap kredibel dan *sustainable*.

Rancangan fiskal 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana asumsi dasar ekonomi makro diharapkan dapat terus membaik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,1-5,5% *year-over-year* (yoy) dengan ditopang oleh terkendalinya inflasi (1,5-3,5%), hilirisasi SDA, pengembangan industri listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM (Tabel 1).

Konsumsi domestik diperkirakan masih kuat dengan terkendalinya inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Akselerasi transformasi ekonomi juga diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan didukung penguatan reformasi struktural yang menekankan pada *easy of doing business* dan memperkuat daya saing

produk ekspor dan investasi. Hal ini untuk mengantisipasi harga komoditas yang masih *volatile*, di mana dipicu oleh potensi eskalasi tensi geopolitik yang menyebabkan disrupsi rantai pasok.

Apakah rancangan fiskal 2025 cukup sehat memfasilitasi prioritas pembangunan yang dicanangkan pemerintahan baru? Menkeu menyatakan cukup kredibel bagi strategi jangka pendek, yaitu dengan menjaga keberlanjutan program prioritas yang saat ini berjalan, serta penguatan program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan penguatan konvergensi antar daerah. Disamping menerapkan kebijakan optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) dengan tetap menjaga iklim investasi, bisnis, dan lingkungan, Pemerintah perlu terus memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah penguatan PNPB melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan tersebut, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB (Tabel 2).

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Deskripsi	2023		2024	2025
	APBN	Realisasi		
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	5,05	5,2	5,1-5,5
Inflasi (% , yoy)	3,6	2,61	2,8	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.800	15,255	15.000	15.300-16.000
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,9	6,68	6,7	6,9-7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	90	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (ribu bph)	660	605,5	635	580-601
Lifting Gas (ribu bsmph)	1.100	960,4	1.033	1.003-1.047

Sumber: Menkeu, 5 Juni 2024.

Tabel 2. Postur Makro Fiskal 2025

Deskripsi	2023		2024	2025	
	APBN	Realisasi	APBN	Batas Bawah	Batas Atas
A Pendapatan Negara	11,7	13,32	12,27	12,14	12,36
1. Penerimaan Perpajakan	9,6	10,31	10,12	10,09	10,29
a. Pajak	8,17	8,94	8,71	8,86	9,05
b. Bea Cukai	1,44	1,37	1,41	1,23	1,25
2. PNBPN	2,1	2,93	2,16	2,05	2,07
3. Hibah	0,002	0,081	0,002	0,001	0,002
B Belanja Negara	14,6	14,94	14,56	14,59	15,18
1. Belanja Pusat	10,7	10,72	10,82	10,92	11,17
2. Transfer ke Daerah	3,9	4,22	3,76	3,67	4,01
C Keseimbangan Primer	-0,75	0,49	-0,11	-0,3	-0,61
D Defisit	-2,84	-1,62	-2,29	-2,45	-2,82
1. Pembiayaan Investasi	-0,84	-0,43	-0,77	-0,3	-0,5
2. Rasio Utang	39,32	38,98	38,26	37,98	38,71

Sumber: Menkeu, 5 Juni 2024.

APBN yang sehat menjadi jangkar untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Komisi XI DPR RI mengusulkan agar pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 12,30-12,36%. Komisi XI DPR RI juga menilai defisit yang ditetapkan sebesar 2,45-2,82% sangat riskan, mengingat batasan defisit adalah 3%. Sementara itu, pemerintahan yang baru membutuhkan ruang fiskal yang cukup fleksibel dalam mengantisipasi pembiayaan bagi program prioritas yang akan dilakukan. Komisi XI DPR RI juga mengingatkan terkait dengan utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 sebesar Rp800,33 triliun. Walaupun demikian, Menkeu memandang hal tersebut bukanlah beban, karena 88,28% dari total utang jatuh tempo berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan 11,72% sisanya berasal dari pinjaman luar negeri bilateral dan multilateral. Namun, dalam hal ini utang harus dikelola dengan kehati-hatian yang tinggi.

Atensi DPR

Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 menghasilkan asumsi makro ekonomi dan rancangan fiskal yang cukup ambisius di tengah ketidakpastian akibat eskalasi tensi geopolitik, suku bunga global yang masih tinggi, dan *emerging challenges*. DPR RI perlu memastikan tahapan dan capaian Komisi XI dalam mewujudkannya melalui tiga program strategisnya yaitu peningkatan pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi (12,14-12,36% PDB), belanja efektif dan efisien mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan (14,59-15,18%), serta pembiayaan inovatif dengan tetap mengendalikan risiko (2,45-2,82%). Disamping tetap mengupayakan ruang fiskal yang cukup bagi program prioritas pemerintahan baru, APBN 2025 juga tetap menjadi instrumen yang sehat dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan, penguatan *well-being*, dan konvergensi antardaerah.

Sumber

antaranews.com, 5 Juni 2024;
 Bisnis Indonesia, 10 Juni 2024;
 katadata.co.id, 7 Juni 2024; dan
 fiskal.kemenkeu.go.id, 10 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
 Polhukam Puteri Hikmawati
 Ekkuinbang Sony Hendra P.
 Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
 Novianto M. Hantoro
 Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
 Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Nidya W. Sayekti
 Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
 Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetyawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024